

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia yang hidup dalam lingkungan sosial budaya serta bertempat tinggal di suatu daerah dimanapun manusia itu berada. Pendidikan di Negara Indonesia ini adalah pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, baik yang tersusun secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Keberhasilan proses pendidikan secara struktur menjadi tanggung jawab Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), namun secara tidak struktur pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang hidup di dalam lingkup sosial dan budaya.

Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang – undang No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang tergolong dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal. Selain itu, pendidikan mempunyai empat jenjang yang akan kita tempuh yakni jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk dapat membentuk karakter masyarakat Indonesia. Tempat yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan saat ini sering kita temui di sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk para guru untuk menjadi pelopor pembentukan karakter anak bangsa agar terbentuk karakter yang tercantum dalam pancasila dan dapat bersaing secara global di kancah internasional. Namun, di Indonesia masih terkendala oleh fasilitas, akses, pendidikan yang belum merata, guru yang kurang berkompeten, dan terlebih daerah terpencil yang jauh dari jangkauan pemerintah.

Pendidikan nonformal menjadi jawaban atas keterbatasan dan kekurangan fasilitas, sumber daya manusia untuk memfasilitasi sarana pendidikan. Melalui pendidikan nonformal pendidikan di Indonesia mengalami fluktuasi, baik dalam lingkup perkotaan maupun pedesaan, bahkan daerah terpencil sekalipun. Pendidikan nonformal dalam menghadapi kondisi pendidikan di Indonesia

Fajar Nugroho Muttaqin, 2016

*PENGARUH LATAR BELAKANG DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI
PENGELOLA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN
PANDEGLANG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memiliki peran yang sangat besar. Hal itu terlihat pada prinsip pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara pengetahuan dan keterampilan pada bidang tertentu. Pendidikan nonformal memiliki system yang berbeda dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal dalam proses pembelajarannya tidak terpaku oleh waktu, tempat, namun tetap memiliki tujuan, program, dan proses yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan nonformal memiliki fungsi sebagai pengganti, penambah, serta pelengkap pendidikan formal yang memiliki tujuan untuk mendukung ketercapaian pendidikan sepanjang hayat. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 4 diatas, pendidikan nonformal selain memiliki fungsi juga memiliki satuan pendidikan untuk membantu ketercapaian tujuan pendidikan sepanjang hayat diantaranya ialah lembaga pelatihan, kursus, kelompok belajar (KOBER), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim, serta satuan pendidikan sejenis (SPS).

PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal yang saat ini telah berkembang pesat di daerah maupun perkotaan dan mampu membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan berbagai macam kegiatan dan program – program yang dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Indonesia. Dalam rangka membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, perlu adanya sumber daya manusia yang mampu mengelola satuan PKBM. maka dari itu diperlukan pengelola PKBM yang mempunyai kompetensi secara profesional untuk dapat mengelola program – program serta kegiatan di dalam PKBM. Lembaga PKBM memiliki peran penting dalam menjalankan hak – hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, perubahan status sosial, ekonomi, serta fasilitas kesehatan demi tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sampai dengan tahun 2015 jumlah PKBM sudah mencapai 9655 lembaga, dimana 6554 PKBM telah memiliki Nomor Induk Lembaga. Dari jumlah PKBM 9655, dan jumlah PKBM yang telah memiliki Nomor Induk Lembaga, dapat diketahui jumlah pengelola PKBM sampai dengan tahun 2015 mencapai 9655 (

Fajar Nugroho Muttaqin, 2016

*PENGARUH LATAR BELAKANG DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI
PENGELOLA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN
PANDEGLANG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

DITJEN PAUDNI). Jumlah pengelola PKBM yang sebanyak itu tentu memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda – beda untuk menunjang kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM. Kompetensi pendidikan nonformal (PKBM) yang diarahkan sebagai tenaga pendidik artinya yang menjalankan proses pendidikan dituntut harus mampu memiliki kompetensi manajerial. Sebagaimana yang terdapat pada DITJEN PAUD dan DIKMAS bahwa kompetensi seorang pengelola pendidikan nonformal khususnya PKBM yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, dan kompetensi sikap kewirausahaan. Kompetensi tersebut diharapkan untuk dimiliki oleh seluruh tenaga pengelola lembaga pendidikan diluar sekolah termasuk pengelola program Pendidikan nonformal khususnya kompetensi Pengelolaan PKBM.

PKBM dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat, serta untuk masyarakat itu sendiri agar dapat mandiri dalam berbagai bidang. Pendirian atau pembentukan PKBM merupakan salah satu upaya untuk dapat merealisasikan program pendidikan nonformal. Pembentukan PKBM di daerah yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan dapat dijadikan sebagai pusat bagi para masyarakat daerah untuk dapat mencari ilmu serta merubah kehidupannya kearah lebih baik. Dengan fakta lapangan seperti ini, maka dibutuhkan pengelola PKBM yang mampu mengelola PKBM dengan baik dan benar.

Keberhasilan PKBM sangat ditentukan oleh kualitas pengelola yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan evaluasi program yang diselenggarakan di PKBM. Salah satu dari kompetensi pengelolaan sebuah PKBM adalah kompetensi manajerial dimana kemampuan pengelola harus dapat menguasai dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Program Pendidikan Non Formal Pasal 1 Nomor 14 tahun 2013, Standard Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencananaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan pendidikan agar tercapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Fajar Nugroho Muttaqin, 2016

PENGARUH LATAR BELAKANG DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI PENGELOLA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembentukan PKBM dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat dengan menanamkan prinsi keswadayaan, kerjasama, serta partisipasi masyarakat itu sendiri. Menurut Kamil (2009, hlm. 85) yang menyebutkan bahwa PKBM dikelola oleh masyarakat atau diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri dan dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat tersebut.

Didalam PKBM terdapat dua hal yang berpengaruh untuk keberhasilan program PKBM, diantaranya tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Tenaga kependidikan merupakan sekumpulan pengelola PKBM yang memiliki fungsi untuk mengelola setiap program di PKBM. Sementara tenaga pendidik merupakan tenaga ajar atau guru yang biasa disebut tutor.

Tugas pokok seorang pengelola PKBM adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, merencanakan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membina pelaksanaan program, melakukan penilaian terhadap program yang berjalan dan membuat pelaporan pelaksanaan program. Pengelola PKBM adalah tenaga kependidikan luar sekolah yang didapat dari lingkungan PKBM itu sendiri bukan orang atau pegawai yang direkrut oleh pemerintah untuk mengelola kegiatan operasional program di PKBM. Dengan kompleksnya tugas pengelola PKBM mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, menilai dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan program-program pendidikan masyarakat maka diperlukan pengelola yang kompeten.

Diklat sangatlah penting bagi pengelola PKBM sebagai pendidikan tambahan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mengelola, mulai mengikuti berbagai diklat tingkat daerah, nasional ataupun internasional. Diklat tersebut diperlukan untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola PKBM. Agar lebih baik pengelola perlu ditunjang dengan pengalaman mengelola suatu lembaga Pendidikan formal maupun nonformal sehingga dari diklat dan pengalaman ini, akan muncul pengelola PKBM dengan kemampuan yang memadai dan mempunyai motivasi dan kemauan kerja yang tinggi. Pengalaman mengelola suatu lembaga pendidikan nonformal akan menunjang kualitas kinerja seseorang. Dengan meningkatnya kualitas seorang pengelola PKBM sudah pasti akan

mempengaruhi tingkat keberhasilan program pendidikan luar sekolah di masyarakat.

Dengan melihat pengelola lembaga PKBM, perlu disadari pula bahwa latar belakang pendidikan pengelola PKBM sangat beranekaragam, latar belakang pendidikan para pengelola PKBM memungkinkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi pengelola yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi yang sudah dimiliki. Mengingat karakteristik pendidikan nonformal sangat berbeda dengan pendidikan formal, dimana pemahaman akan karakteristik masyarakat, model-model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan manajemen program pendidikan nonformal harus benar - benar dipahami dan dikuasai, sehingga program - program yang dibutuhkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Pengelola PKBM selama ini berasal dari lingkungan sekitarnya yang dianggap mampu menjalankan fungsi manajerial di PKBM, tanpa prasyarat Kemampuan - kemampuan tertentu yang harus dimiliki. Kondisi ini disatu sisi memang menguntungkan, dimana pengelola sangat mengenal karakteristik dari warga masyarakat dimana PKBM tersebut didirikan, sehingga program-program bisa sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kualifikasi untuk menjadi pengelola PKBM diantaranya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, diklat, dan pengalaman mengelola. Diklat dan pengalaman dapat berpengaruh besar dengan melihat kondisi masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kota serta perguruan tinggi, mereka hanya memperoleh pengetahuan dalam mengelola PKBM melalui diklat pengelola PKBM serta pengalaman yang ia miliki.

Pengelolaan PKBM tidak cukup hanya dengan mengenal karakteristik masyarakat saja, akan tetapi masih banyak lagi yang perlu mereka kuasai agar PKBM yang mereka kelola dapat berjalan dengan tertib, terutama peserta belajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk menunjang hidup lebih baik.

Persoalan yang timbul dalam konteks menejerial yang terjadi di lapangan, terlihat gejala untuk menjadi pengelola suatu lembaga PKBM seperti yang telah disebutkan diatas. Kemampuan - kemampuan sebagai prasyarat, misalnya dari

Fajar Nugroho Muttaqin, 2016

*PENGARUH LATAR BELAKANG DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI
PENGELOLA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN
PANDEGLANG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

orang yang ditokohkan, pensiunan pegawai negeri terutama Guru yang secara teknis tidak dibekali kemampuan mengelola pendidikan nonformal, dan masyarakat yang dianggap mampu untuk mengelolanya. Tampaknya hal ini kurang menguntungkan terhadap hasil kelola yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Keberhasilan suatu lembaga PKBM ditentukan oleh kemampuan pengelola dalam perencanaan, penyusunan serta penetapan tujuan yang efektif yang tergambar dari pengorganisasian pengelolaan suatu lembaga dalam hal ini PKBM.

Pengelola PKBM dalam melaksanakan tugasnya berhadapan langsung dengan obyeknya yaitu sekumpulan masyarakat yang mempunyai perbedaan karakteristik, dimana dalam mengelola suatu lembaga perlu adanya perencanaan dengan seksama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan suatu lembaga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pengarahan pelaksanaan program, pengendalian pelaksanaan program, dan evaluasi pelaksanaan program.

Secara umum, kompetensi pengelola PKBM merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pengelola yang mencakup pengetahuan dan keterampilan serta menekankan terhadap perilaku yang terukur sebagai tanda penerapan kompetensi yang dimiliki oleh pengelola tersebut.

Berdasarkan uraian di atas faktor pengelola sangat dominan dalam keberhasilan pengembangan suatu lembaga PKBM. Penulis tertarik untuk mencari gambaran dalam sebuah penelitian ada tidaknya pengaruh Diklat dan pengalaman sebagai pengelola PKBM. Maka dari itu penulis dapat mengambil judul “Pengaruh Diklat dan Pengalaman Kerja Terhadap Kompetensi Pengelolaan Lembaga PKBM.

Melihat fakta dilapangan kualifikasi penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah/Non Formal khususnya penyelenggara PKBM terlihat gejala untuk menjadi pengelola suatu lembaga Pendidikan Nonformal dengan jalan pintas yakni dengan melalui penataran, diklat pelatihan, pengalaman dan sejenisnya langsung terjun menjadi pengelola lembaga pendidikan nonformal. Tampaknya hal ini kurang menguntungkan terhadap hasil belajar peserta didik yang

Fajar Nugroho Muttaqin, 2016

PENGARUH LATAR BELAKANG DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI PENGELOLA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal itu sendiri, terlebih pencapaian standar pendidikan nasional. Karena belum tentu dengan pendidikan yang begitu singkat dapat memanej pembelajaran, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi proses penyelenggaraan pendidikan nonformal. Sukses tidaknya penyelenggaraan suatu pendidikan umumnya, khususnya pendidikan nonformal ditentukan dengan kemampuannya memanejerial suatu proses pengelolaan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada beberapa penyelenggara pendidikan nonformal didapat keanekaragaman latar belakang pendidikan, pendidikan tambahan, serta pengalaman pengelolaan di lembaga pendidikan nonformal, sudah tentu juga ada keanekaragaman kemampuan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pengelolaan pendidikan nonformal.

Di wilayah Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang terdapat 48 lembaga PKBM dengan berbagai latar belakang pengelola PKBM yang berbeda – beda. Pengelola PKBM masing – masing memiliki latar belakang pendidikan SLTA, D3, S1, dan S2. Dengan latar belakang yang berbeda tentunya kompetensi pengelola yang dimiliki oleh pengelola PKBM di wilayah Kabupaten Pandeglang terdapat perbedaan. Kompetensi pengelola lembaga PKBM sangat mempengaruhi terhadap kualitas lembaga PKBM yang dikelola dengan Tujuannya untuk memperoleh penilaian kinerja. (DITJEN PAUDNI).

Data PKBM wilayah Kabupaten Pandeglang beserta pengelola mempunyai berbagai macam latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari 48 PKBM, terdapat 19 PKBM yang memiliki NILEM yang baru, dan 24 PKBM lainnya memiliki NILEM yang lama, dan sisanya belum memiliki nomor induk lembaga. Pada penelitian ini, pengelola yang menjadi sasaran diambil dari lima lembaga PKBM di Kabupaten Pandeglang, PKBM tersebut terletak di empat kecamatan, yakni Kecamatan Labuan, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Sobang. PKBM yang menjadi tempat penelitian adalah PKBM Annisa Harapan, PKBM Bojen Mandiri, PKBM Citra Bangsa, dan PKBM Maritim (ditjen PAUDNI).

Keberhasilan dalam mengelola PKBM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana faktor tersebut dapat menunjang terhadap pengetahuan dan keterampilan, serta penerapannya di lapangan. Keberhasilan dalam mengelola PKBM perlu adanya faktor kunci yang berperan penting di dalamnya. Faktor kunci tercapainya keberhasilan dalam mengelola PKBM terdapat pada tenaga kependidikan atau pengelola PKBM, hal tersebut diungkapkan oleh Utama (2000). Maka dari itu peneliti meneliti sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh pengelola PKBM melalui judul “Pengaruh Latar Belakang Diklat dan Pengalaman Kerja Terhadap Kompetensi Pengelola Pusat kegiatan Belajar Masyarakat PKBM.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat kesenjangan antara kualifikasi pengelola PKBM yang sudah dimiliki dengan kualifikasi pengelola yang seharusnya dimiliki. Hal tersebut berdasarkan hasil peninjauan terlihat keberanekaragaman latar belakang pendidikan, diklat, serta pengalaman mengelola suatu lembaga pendidikan nonformal yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Terdapat pengelola PKBM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan S1 PLS sebagai modal dasar agar dapat mengelola PKBM dengan baik dan benar.
3. Terdapat gejala yang terlihat pada aktifitas manajerial pengelolaan program PKBM, sehingga dalam prosesnya terdapat ketidaksesuaian antara apa yang telah direncanakan dengan hasil yang ingin dicapai.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh latar belakang diklat terhadap kompetensi pengelola PKBM di kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kompetensi pengelola PKBM di Kabupaten Pandeglang ?
3. Bagaimana pengaruh latar belakang Diklat dan pengalaman kerja terhadap kompetensi Pengelola PKBM di kabupaten Pandeglang ?

Fajar Nugroho Muttaqin, 2016

PENGARUH LATAR BELAKANG DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI PENGELOLA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Pengaruh latar belakang diklat terhadap kompetensi pengelola PKBM di Kabupaten Pandeglang
2. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kompetensi pengelola PKBM di Kabupaten Pandeglang
3. Pengaruh latar belakang diklat dan pengalaman kerja terhadap kompetensi Pengelola PKBM di Kabupaten Pandeglang.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penulis dapat merumuskan manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah partisipasi pemikiran dan menambah pengetahuan tentang pengaruh latar belakang diklat dan Pengalaman Kerja terhadap Kompetensi Pengelola lembaga PKBM,
2. Manfaat Kebijakan, penelitian ini dapat membantu para pengelola meningkatkan kompetensi dalam mengelola PKBM sesuai dengan DITJEN PAUD dan DIKMAS
3. Manfaat Praktik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang berbeda dan solusi bahwa latar belakang diklat dan Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kompetensi pengelola dalam mengelola PKBM, serta mampu membantu memecahkan masalah yang berkaitan tentang kompetensi pengelola PKBM.
4. Manfaat isu serta aksi sosial, penelitian ini mampu dijadikan alat untuk pencerahan serta pengalaman terhadap permasalahan yang ada didalam kehidupan, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengelola PKBM

E. Struktur Organisasi Skripsi

Fajar Nugroho Muttaqin, 2016

PENGARUH LATAR BELAKANG DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KOMPETENSI PENGELOLA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN PANDEGLANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasan isi skripsi dapat dijelaskan dalam panduan penulisan karya ilmiah UPI tahun akademik (2015; hlm. 17) diantaranya sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian bab ini menjelaskan latar belakang diadakan penelitian ini, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penelitian.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bagian ini membahas tentang teori atau kajian pustaka, hipotesis, kerangka berfikir, serta definisi operasional.

3. Bab III Metode Penelitian

Bagian ini membahas kaidah dan komponen dari metode penelitian, yaitu desain penelitian, variabel penelitian, populasi/sampel penelitian, instrument penelitian, proses pengembangan instrumen, lokasi penelitian, teknik pengeumpulan data, dan analisis data.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian beserta pembahasannya.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini membahas mengenai penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis penemuan penelitian.